

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA PANSUS
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa persidangan : V
Rapat ke :
Jenis rapat : Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Dengan : 1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Hukum dan HAM RI.
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Kamis, 24 Juni 2021
Waktu : 10.10 s.d. 11.25 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II lantai 3
Acara : 1. Penyampaian Pandangan Pemerintah
2. Penyerahan DIM
3. Penyusunan Jadwal Pembahasan.
- Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus
Hadir : 1. Hadir 22 anggota dari 30 orang anggota Pansus.
- 15 hadir fisik
- 7 hadir virtual
2. Pemerintah:
a. Menteri Dalam Negeri.
b. Menteri Keuangan (diwakili Dirjen Perimbangan Keuangan/Astera Primanto Bhakti).
c. Menteri Hukum dan HAM RI (diwakili Wamenkumham Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum)
c. Kepala BPHN (Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum, C.N.)
3. DPD RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di pimpin oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
3. Pandangan Pemerintah disampaikan Mendagri sbb:
 - a. Bahwa pemerintah konsisten sesuai dengan Surpres yg telah disampaikan bahwa perubahan RUU hanya pada Pasal 1, Pasal 34, dan Pasal 76.
 - b. Bahwa konsentrasi perubahan terkait dengan pemanfaatan Dana Otsus dan Pemekaran sebagaimana aspirasi yg disampaikan oleh masyarakat Papua kepada Pemerintah.
 - c. Sementara untuk masukan masukan dan aspirasi lain diluar yg diusulkan pemerintah agar dibahas pada tingkat Panja.
 - d. Adapun dari Pemerintah akan diwakili oleh Dirjen Otda, Dirjen Polpum serta dari Kemenkeu dan kemenkumham juga akan diwakilkan ke Pejabat Eselon I.
4. Pandangan Fraksi-fraksi:
 - (1) Fraksi Partai Golkar
 - a. Pembahasan agar dilakukan secara khusus dan usulan DPD agar menjadi perhatian dalam pembahasan.
 - b. Kami juga akan minta penjelasan mengenai pelaksanaan Otsus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya agar kedepan lebih terukur
 - c. Bahwa dalam pembahasan Panja tidak hanya melibatkan 3 kementerian saja melainkan agar melibatkan K/L terkait agar dalam pelaksanaannya nanti akan lebih sinergi.
 - d. Kami usulkan agar dalam setiap rapat panja dari Pemerintah agar dihadiri oleh Wakenkumham sebagai koordinator eselon I mewakili Pemerintah.
 - (2) Fraksi Demokrat
 - a. Menyampaikan bahwa kontribusi Papua terhadap Pemerintah Pusat sangat besar, oleh karena itu apakah Dana Otsus sebesar 7 triliun sebanding dengan kontribusi Papua.
 - b. Sepakat untuk melibatkan K/L terkait.
 - (3) Fraksi PDIP
 - a. Bahwa dalam masukan Kami terdapat hal-hal detail yang harus diatur dalam RUU khususnya terkait dengan kesehatan, keuangan, dan pendidikan.
 - b. Perlu dibentuk Badan Khusus yg melakukan pengawasan pelaksanaan Otsus.
 - (4) Fraksi PAN
 - a. Usulan DPD yg akan menyampaikan DIM tambahan agar disepakati sebagai bagian tidak terpisahkan dari DIM yang akan diserahkan ke Pemerintah.

b. Sepakat untuk melibatkan K/L terkait.

(5) Fraksi PPP

- Agar pembahasan RUU Otsus Papua fokus pada pemanfaatan Dana Otsus tidak melebar ke hal lain.

(6) Wakil Ketua Pansus Fraksi PKB

a. Bahwa Otsus tidak dirasakan langsung oleh masyarakat Papua

b. Evaluasi pelaksanaan Otsus minim sehingga terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya.

c. Agar dilakukan dialog dengan masyarakat Papua khususnya dalam pelaksanaan Otsus.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Pansus DPR RI bersama-sama Pemerintah menyetujui penyerahan DIM dari Fraksi-Fraksi DPR RI dan DPD RI yang tergabung dalam Pansus DPR RI untuk dibahas bersama Pemerintah sesuai dengan mekanisme pembahasan yang telah disetujui.
2. Pansus DPR RI menyetujui pembentukan Panja untuk membahas DIM lebih lanjut bersama-sama dengan Pemerintah.
3. Pansus DPR RI meminta agar Pemerintah mengkoordinir dan menghadirkan juga pihak kementerian dan lembaga terkait (Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Bappenas, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Agama) dalam pembahasan DIM di Panja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.25 WIB.

KETUA PANSUS

KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.

A.263